

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, edisi 1, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012.
- A.P. Parlindungan, 1990. *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2008. *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju.
- Adrian Sutedi, 2006. *Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-undang Pokok Agraria*, (Jakarta: BP Cipta Jaya,), hlm. 158.
- , 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah, 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 1*, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
- Aslan Noor, 2006. *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Bachtiar Effendi, 1983. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.
- B., Hestu, 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademis*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- B. F. Sihombing, 2005. *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- , 2018. *Sejarah Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Bivitri Susanti, 2006. *Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2005* Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
- Boedi Harsono, 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.

- , 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: PT. Djambatan.
- , 2008. *Undang-Undang Pokok Agraria, (Sejarah Penyusunan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jilid 2, Jakarta: Djambatan.
- CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Effendi Perangin, 1989. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Elza Syarif, 2014. *Persertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Huma, 2014. *Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat KiatKiat Praktis Bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat*, (Jakarta: Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Ekologis Perkumpulan HuMa bekerjasama dengan Rights Resource Institute (RRI).
- Ida Nurlinda, 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Imam Soetiknjo, 1994. *Politik Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Irwansyah, 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jonathan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- K. Wantjik Saleh, 1977. *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Kurnia Warman, 2010. *Peta Perundang-Undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: KITLU.
- Lilik Mulyadi, 2017. *Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI.

- Mahfud, MD. 2010. *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Maria Soemardjono., 1982. *Puspita Seragkaian Aneka Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta. Penerbit Andi Offset.
- Maria Farida Indrati S., 2010. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi. Muatan)*, Yogyakarta: Kanisius.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- O.K. Saidin, 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Otje Salman dan Anthon. F Susanto, 2013. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- , 2011. *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Harmanses., 1996. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia* Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 2001. *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: P.T. Internusa.
- R. Subekti Dan R. Tjitro Sudibyo., 1969. *Kamus Hukum*, Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita.
- Samun Ismaya, 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004..

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerojo Wignjodipoero, 1984. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung.
- Sonny Keraf, 1997. *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi* Yogyakarta: Kanisius.
- Sudikno Mertokusumo, 1998. *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2008. *Hukum dan Politik Agraria*, Universitas Terbuka, Jakarta, Karunika.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Teer Haar, 2010. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* Terjemahan K.N Soebakti Pusponoto, Jakarta: Pradnya Pramitha.
- Urip Santoso, 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana.
- , 2011. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana.

### **Disertasi, Tesis**

- Agung Raharjo, *Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat Oleh Ahli Waris*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Bastanta Kurnia Ginting, *Jual Beli Atas Tanah Milik Adat Di Kampung Skouw Mabo, Kota Jayapura*, Tesis Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2021.
- Don Arfan, *Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Hukum Adat Yang Dijadikan Dasar Untuk Pendaftaran Tanah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.55/Pdt.G/2002/PN.CBN)*, Tesis Kenotariatan Pascasarjana Universitas Indonesia, 2019.
- Fitriana Rakhma Rasyid, *Kekuatan Pembuktian Rincik Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah*

Agung No. 392/K/Pdt/2005), Tesis Kenotariatan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

Ronal Z Titahelu, *Penerapan Asas-asas Hukum Umum Dalam Penggunaan Tanah Untuk Kemakmuran Rakyat*. Disertasi Pascasarjana Universitas Airlangga, 1993.

Setyo Wibowo, *Pelaksanaan Jual-Beli Tanah Bekas Hak Milik (Adat) Di Kabupaten Bekasi*". Tesis Kenotariatan Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Syamsul Bahri., *Beberapa Aspek Hukum Adat Yang Berpengaruh*, (Disertasi Universitas Sumatera Utara).

### **Jurnal, Makalah**

Emmy Solina dkk, *Kebijakan Badan Pertanahan Nasional Kota Tanjung Pinang dalam Mengeluarkan Sertifikat hak Kepemilikan Permukiman yang di Atas Air*, Jurnal Selat, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2019.

Ida Nurlinda, *Telaah atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang Pertanahan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1, September 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD NRI 1945 Hasil Perubahan*. Makalah, BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta, 29-31 Mei 2006.

Maria S.W. Sumardjono, *Ihwal Hak Komunal Atas Tanah*, dalam Jurnal "Digest Epistema", Vol. 6, 2016, 4-6.

Suparjo Sujadi, "Pendaftaran Tanah (Initial Registration) Tanah Bekas Hak Milik Adat Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Dan Kota Depok (Laporan Penelitian Singkat Mengenai Praktek Pelaksanaannya)", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun XXXIV.

Ulfia Hasanah, *Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat Berdasarkan Uu No 5 Tahun 1960*, artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2.No.2. Februari 2012.

### **Internet**

Alfi Renata, "*Pelepasan Hak Milik Atas Tanah*", artikel dimuat dalam hukumonline (19/04/2010), selengkapnya dapat dilihat di: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5382/pelepasan-hak-milik>. Data Akses hari Rabu 13 April 2022 pukul 21.50 wita.

Ivor Pasaribu, “*Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah*”, artikel dimuat pada hukumonline.com, Senin (4/06/2012), selengkapnya dapat dilihat dalam:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fae976f5aed2/surat-pernyataan-pelepasan-hak-atas-tanah/>. Data Akses hari Rabu 13 April 2022 pukul 21.45 wita.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Quadragesimo\\_anno](https://id.wikipedia.org/wiki/Quadragesimo_anno). Data akses 15 April 2022 pukul 21.35 wita.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca amandemen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Jabatan PPAT, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.

Permen ATR/Kepala BPN No 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Permen ATR/Kepala BPN No 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Permen ATR/Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Permen ATR/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN Nomor: 9/SE/VI/2013 Tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat.

### **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.